

ISU-ISU PARIWISATA DI ASEAN : STUDI LITERASI

¹Rieke Retnosary

²N. Neni Triana

³Netti Nurlenawati

Program Studi Manajemen, Fakultas ekonomi dan Bisnis

Universitas Buana Perjuangan Karawang

rieke.retnosary@ubpkarawang.ac.id ¹ neni.triana@ubpkarawang.ac.id ²

netti.nurlenawati@ubpkarawang.ac.id ³

ABSTRAK

Pola yang sama atas isu yang terjadi di pariwisata menjadi perhatian seluruh dunia karena memberikan dampak bagi kunjungan, terutama di pariwisata ASEAN. Sedikit sekali pembahasan berkenaan pola tersebut di ASEAN sehingga memerlukan penggambaran khusus untuk meyakinkan betapa pentingnya fokus kajian yang bukan hanya di ketahui tapi diimplementasikan. Literasi menunjukkan pola isu yang mencerminkan upaya kolektif untuk memajukan kerjasama regional, mengatasi dampak negatif dari pariwisata, dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Fokus pada inovasi hijau, energi terbarukan, dan perlindungan terhadap perdagangan manusia menunjukkan kompleksitas dan interkoneksi berbagai isu dalam konteks global dan regional. Perlu memperluas literasi untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh dari berbagai sumber basis data sehingga permasalahan yang terjadi di ASEAN lebih akurat.

Kata Kunci: Dampak Kunjungan, Pariwisata ASEAN, Literasi, Pola Isu, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

The same pattern of issues in tourism has become a concern worldwide because it impacts visits, including ASEAN tourism. While there has been limited discussion on these matters in ASEAN, this presents an opportunity for deeper exploration and understanding of their implications and applications. Improving literacy is crucial, as it highlights the ongoing challenges and underscores the importance of collaborative efforts to strengthen regional cooperation, reduce the negative impacts of tourism, and support sustainable development. By

emphasising green innovation, renewable energy, and the prevention of human trafficking, we can better appreciate the complex interconnections among various challenges on both global and regional scales. By fostering increased literacy and facilitating access to diverse data sources, ASEAN can enhance its ability to address these issues effectively. This proactive approach will enable the region to navigate its challenges and work towards a more sustainable and resilient future.

Keywords: Pattern of Issues, Impacts Visits, ASEAN Tourism, Challenges, Sustainable

PENDAHULUAN

Pariwisata di dunia memberi peran signifikan pada pendapatan dan kesejahteraan, sehingga menjadi pilihan suatu negara sebagai devisa dan perbaikan ekonomi masyarakat. Merencanakan dan mengembangkan pariwisata secara terarah dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dengan tetap mencari kompromi antara tujuan lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat (Streimikiene dkk., 2021).

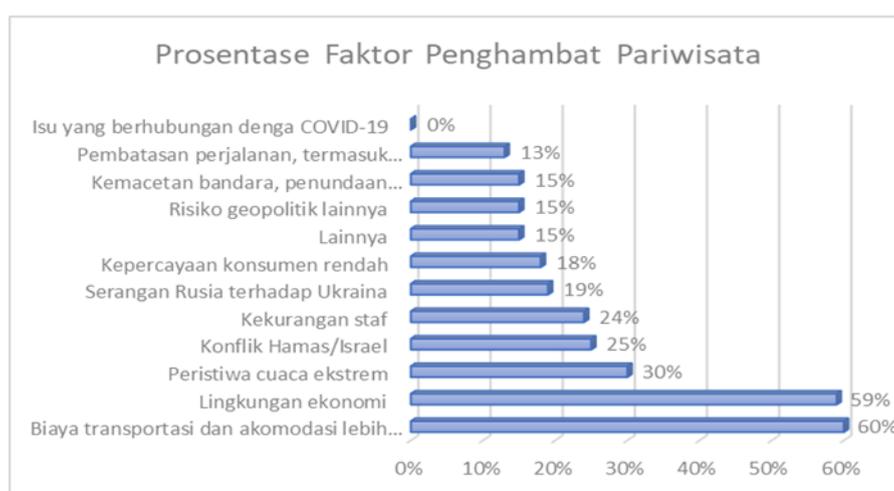
Namun dalam kegiatannya, isu-isu politik membentur kegiatan tersebut sehingga mengganggu keberlanjutan. Seperti sekarang ini terjadi isu politik yang semakin meluas sejak konflik dimulai dari Gaza, Palestina pada 7 Oktober 2023 yang melibatkan negara-negara di dunia. Termasuk krisis yang terjadi di Lebanon, ketidakstabilan politik dan terorisme mendapat perhatian luas di media sosial yang memainkan peran penting dalam menyebarkan peristiwa yang terjadi kepada semua penduduk global sehingga memberikan dampak langsung terhadap pengambilan keputusan masyarakat ketika mempertimbangkan untuk mengunjungi destinasi mana pun (Rasha dan Chible, 2020).

Nurjaya (2018) dalam studinya menyatakan bahwa pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan memerlukan partisipasi semua pemangku kepentingan terkait, serta instrumen kebijakan dan hukum serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan partisipasi luas dan komitmen para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, prinsip keberlanjutan pariwisata mengacu pada keterpaduan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam pembangunan berkelanjutan. Masalahnya adalah, seberapa besar komitmen pemangku kepentingan dalam menghadapi pengaruh isu politik yang memberikan dampak terhadap destinasi, dan sejauh mana pemangku kepentingan mengontrol atau memperbaiki dengan kebijakan yang diambilnya. Dengan permasalahan yang sama dihadapi, bagaimana pengambilan keputusan untuk masing-masing destinasi. Perlu eksplorasi lebih lanjut untuk mendapatkan pengetahuan tersebut.

Di tempat lain, Bosnia dan Herzegovina melakukan pembaharuan ekonomi dan sosial setelah konflik politik memengaruhi pengembangan pariwisata. Administrasi dan tata kelola yang diterapkan untuk mengatasi konflik politik mengalami kegagalan dalam mencapai kolaborasi antar komunitas yang terpecah sehingga menghambat pemulihan sosial dan ekonomi. Sektor wisata menjadi pilihan dalam membangun kemitraan antara pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik. Pariwisata dinilai sebagai pilihan terbaik untuk pendekatan yang lebih kolaboratif (Causevic dan Lynch, 2013).

Lain halnya dengan pedesaan. Penelitian pariwisata pedesaan berkembang setiap tahunnya, dan di negara-negara maju pariwisata pedesaan memperdebatkan isu-isu kritis seperti politik masyarakat, perebutan kekuasaan, kontrol sumber daya, serta isu-isu baru, seperti perubahan iklim dan epidemi memiliki cakupan yang luas di masa depan terutama dalam konteks Dunia Timur (Karali dkk., 2021). Selain itu, kebijakan utama untuk memajukan wisata, adalah termasuk memastikan stabilitas politik, meningkatkan pasar keuangan hijau (green financial markets) melalui fintech dan blockchain, dan menerapkan langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang telah berlaku di ekowisata negara Cina (Shang dkk., 2024).

Semua hal yang disebutkan diatas adalah kejadian yang memberikan dampak pada aktivitas wisata. Menurut hasil survey di bulan Mei 2024 oleh United Nation Tourism, ada beberapa faktor yang menghambat pemulihan wisata internasional, seperti yang diterangkan oleh gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Faktor Penghambat Pariwisata Internasional Sumber: Latest Tourism Data. UN Tourism Barometer

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa, isu COVID-19 tidak menjadi kendala di masa sekarang ini, karena kecenderungan orang sudah melihat faktor-faktor lain yang sedang terjadi termasuk kejadian alamiah yang tidak bisa diprediksi. Adapun kebijakan pemulihan sudah

banyak dilakukan untuk menahan “serangan” wabah yang berulang. Seperti yang dilakukan oleh Cina, tindakan pencegahan, pemulihan dan pembangunan pariwisata, dukungan kebijakan, dan pengelolaan oleh Departemen bidang wisata dan langkah-langkah kebijakan pun dilakukan dengan cara yang berbeda disesuaikan dengan situasi dan atau kultur di setiap tempat (Shao dkk., 2021).

Penghambat lainnya adalah berkenaan kesulitan orang untuk membayar lebih (60%) menjadi faktor terbesar dalam keberlangsungan pariwisata, disusul oleh faktor lain seperti masalah lingkungan ekonomi (59%) dan cuaca ekstrim (30%) yang juga memberikan dampak. Dilihat dari hasil studi dan data tersebut, rata-rata hambatan di setiap destinasi atau tempat adanya aktivitas wisata di suatu negara, memiliki kecenderungan yang sama berkenaan sebab dan akibat yang ditimbulkannya. Namun, perlu untuk mengaji lebih mendalam tentang seberapa luas isu yang terjadi di sebuah destinasi sehingga memengaruhi aktivitas wisata tersebut. Setiap isu yang terjadi di sebuah negara akan memberikan dampak yang sama terhadap kunjungan, yaitu calon pengunjung akan berfikir kembali untuk datang ke destinasi yang dituju karena berhubungan dengan tingkat kepercayaan (18%) terhadap keamanan dan kenyamanan.

Secara umum, studi yang dilakukan memberikan gambaran dengan jelas, namun kajian khusus perlu dilakukan juga dengan menggunakan pendekatan yang sama yaitu studi literasi untuk melihat pola isu yang terjadi dalam suatu negara dengan kultur dan demografi yang hampir sama atau mirip. Pengerucutan studi dilakukan untuk memberikan wawasan mendalam sehingga dapat memberikan informasi yang lebih spesifik atas pola isu. Dengan studi yang pernah dilakukan, dapat memperlihatkan seberapa dalam perhatian para peneliti terhadap isu dengan studi kasus tersebut dan kesenjangan (gap) antara setiap destinasi di sebuah negara.

ASEAN menjadi penelitian yang tepat untuk melihat melihat pola tersebut karena terdiri dari kumpulan negara yang bekerjasama dengan kultur dan demografi yang hampir sama. Selain itu pula, jika dilihat dari studi atau kajian yang sudah pernah dilakukan, sedikit sekali yang membahas tentang Kajian Isu di pariwisata ASEAN secara khusus.

Permasalahan sebagai isu yang dekat dan cukup mengganggu adalah penghargaan terhadap penduduk lokal. Agyeiwaah (2020) melakukan tinjauan literatur (literature review) tentang penelitian populer yang sebagian terjadi di kota-kota maju di Eropa adalah berkenaan pemahaman sikap penduduk, dampak yang dirasakan dari pariwisata yang berlebihan, ketahanan masyarakat, dan strategi berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut. Agyeiwaah konsentrasi terhadap peran pemerintah dalam memastikan bahwa konsumsi berkelanjutan diterapkan secara berkelanjutan dalam konteks pariwisata yang berlebihan (over- tourism).

Bagaimana dengan di ASEAN?

Lain halnya dengan Rosalina dkk. (2021) yang menyoroti Pariwisata Pedesaan (Rural Tourism) dalam konteks negara maju dan berkembang dengan data yang digunakan pada rentang 2019 – 2021. Menurut hasil tinjauan mereka, destinasi pedesaan menghadapi tantangan internal dan eksternal berkaitan dengan sumber daya internal, meskipun tantangan eksternal ditemukan lebih besar dalam konteks negara maju. Bagaimana di ASEAN yang notabene terdiri dari negara yang sedang berkembang dan telah maju?

Arabadzhyan dkk. (2020) melakukan tinjauan terhadap perubahan iklim yang berdampak pada pariwisata. Kualitas layanan bergantung pada kualitas dan pengelolaan serangkaian atribut lingkungan. Penelitian ini secara kritis meninjau bukti empiris dalam literatur selama rentang 2000–2019, dengan mengidentifikasi dampak potensial perubahan iklim di destinasi pesisir dan maritim. Ditemukan heterogenitas, dengan estimasi dampak fisik dan sosial-ekonomi perubahan iklim yang berbeda di berbagai destinasi dan metodologi. Menurut mereka, sebagian besar penelitian 2000-2019 hanya membahas beberapa dampak terpenting, dan perlu diarahkan kembali ke indikator dan hubungan yang terabaikan, yang merupakan kunci untuk merancang kebijakan iklim yang efektif di destinasi wisata. Bagaimana dengan ASEAN, terutama dalam rentang waktu setelah 2019?

Ketiga tinjauan ini memperkuat penelitian yang harus dilakukan di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, dimana kemungkinan yang terjadi di Eropa akan berbeda karena memiliki kultur yang berbeda. Adapun permasalahan dengan stakeholder seperti contohnya penduduk atau masyarakat lokal menjadi isu penting yang perlu dilihat di ASEAN dengan rentang waktu terbaru, karena kondisi saat ini baru saja terlepas dari wabah COVID-19. Berdasarkan studi Beh dan Lin (2022), wisata Internasional terutama ASEAN sangat terpengaruh dengan adanya wabah tersebut, dengan menunjukkan adanya kausalitas dua arah antara COVID-19 dan kedatangan wisatawan pada tingkat signifikansi 95%.

Begitupun berkenaan perubahan iklim, dimana beberapa negara anggota ASEAN memiliki wisata maritim dan saling berdekatan. Bagaimana kebijakan yang dilakukan antar bangsa terhadap isu ini perlu juga diperhatikan.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau biasa disebut ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan bertujuan untuk menyejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara yang sekarang ini berjumlah sebelas negara. ASEAN memiliki prinsip lima pilar

dalam kegiatan ekonomi, yaitu Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Sustainable economic growth); Inklusivitas sosial, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan (Social inclusiveness, employment, and poverty reduction); Efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan perubahan iklim (Resource efficiency, environmental protection, and climate change); Keanekaragaman nilai budaya, dan warisan (Cultural values diversity, and heritage), serta; Saling pengertian dan perdamaian, kesehatan, keselamatan, dan keamanan (Mutual understanding and peace, health, safety, and security) (The ASEAN, 2024).

Adapun ASEAN memiliki beberapa prioritas strategi, salah satu prioritas strateginya adalah kebijakan pariwisata berkelanjutan, peraturan, lingkungan, dan strategi (sustainable tourism policy, regulatory, environment, and strategy) dengan tujuan strateginya adalah statistik dari pengunjung dan keterlibatannya (visitor statistic and engagement), profitabilitas industri/viabilitas (industry profitability/viability), keterikatan berkenaan kesejahteraan masyarakat (community prosperity engagement), perlindungan dan peningkatan lingkungan (environment protection and enhancement) (The ASEAN, 2024).

Dari prioritas strategi di atas, peneliti sangat ingin mengetahui bagaimana kebijakan pariwisata berkelanjutan, peraturan, lingkungan, dan strategi yang dilakukan oleh negara-negara yang bergabung dalam ASEAN berkaitan dengan isu-isu yang terjadi dalam aktivitas wisata.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, seberapa luas isu yang terjadi di ASEAN sehingga berdampak pada aktivitas wisata; seberapa besar komitmen pemangku kepentingan di ASEAN dalam menghadapi isu-isu yang memberikan dampak kepada banyak destinasi, dan; bagaimana masing-masing tempat dapat melakukan kontrol atau perbaikan dengan kebijakan atau peraturan yang diambil oleh pemangku kepentingan negara-negara tersebut termasuk isu lingkungan dan penerapan strateginya. Rumusan masalah ini akan terjawab dari hasil pengumpulan informasi yang berasal dari literasi yang telah di teliti. Gap dan limitasi akan tergambar dari hasil pengumpulan data yang kemudian dianalisis.

Tujuan dan Urgensi Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memahami seberapa besar isu-isu yang terjadi dan telah di bahas oleh beberapa studi yang berdampak pada aktivitas wisata ASEAN; memahami komitmen pemangku kepentingan di ASEAN dalam menghadapi isu-isu yang memberikan dampak kepada banyak destinasi, dan; menganalisis aktivitas kontrol atau perbaikan dengan kebijakan atau peraturan yang diambil oleh pemangku kepentingan ASEAN terhadap isu-isu di pariwisata termasuk isu lingkungan dan penerapan strateginya.

Urgensi penelitian ini berkaitan dengan kebijakan, sosial dan budaya setempat dalam aktivitas pariwisata. Urgensinya adalah bagaimana dunia memahami isu dan melakukan pemulihan terhadap isu-isu yang berdampak pada aktivitas pariwisata di tempat mereka sebagai negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, serta bagaimana implikasi dari aktivitas tersebut.

Tinjauan Pustaka

Wabah COVID-19 dan tingginya risiko pandemi yang terjadi beberapa tahun lalu telah menimbulkan tantangan baru bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan (Streimikiene dkk., 2021; Ntonius dkk., 2022). Ntonius dkk. (2022) menjelaskan bahwa ketahanan terhadap krisis terlihat lemah atau bersifat sementara pada kejadian COVID-19, dimana industri pariwisata dan perhotelan sangat terkena dampaknya. Hal ini terjadi karena tidak dapat diprediksinya peristiwa yang terjadi tersebut secara mendunia dan sangat memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Partisipasi masyarakat dan responsif akan kondisi menjadi salah satu cara untuk penyelesaian masalah pandemi yang merupakan kebijakan politik pemerintah (Hastangka dan Farid, 2020; Mahmudah dan Imelda, 2021).

A. Pariwisata Sebagai Pendapatan

Pariwisata adalah industri pilihan bagi suatu negara untuk meningkatkan Devisa negara serta memberikan motivasi bagi masyarakat dunia untuk ikut terlibat sehingga memberikan dampak yang signifikan dengan memberi ruang sebagai sebuah pendapatan (Kwabi dkk. (2023); Zhang, 2023; Dossou dan Berhe, 2024), serta menumbuhkan ekonomi lebih cepat (Martial dkk., 2023).

B. Isu-isu Pariwisata di Dunia

Pariwisata memberikan dampak yang signifikan terhadap suatu negara baik itu secara pendapatan, investasi, maupun pergerakan ekonomi. Seperti studi yang dilakukan di Pakistan oleh Khan dkk. (2020) yang menemukan bahwa peningkatan 1% dalam pariwisata secara signifikan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,051%, investasi asing langsung sebesar 2,647%, pembangunan energi sebesar 0,134%, dan pembangunan pertanian sebesar 0,26%, serta mengurangi kemiskinan sebesar 0,51% dalam jangka panjang.

C. Isu Sanksi dan Boikot

Perlu untuk memperkecil sanksi atas suatu negara agar dapat menggerakkan ekonomi mereka secara baik. Secara keseluruhan, studi tentang sanksi memperdalam pengetahuan tentang keterkaitan antara geopolitik, kebijakan luar negeri, dan pariwisata serta dampaknya terhadap destinasi wisata (Seyfi dan Hall, 2020).

Dampak boikot pariwisata sebagai sanksi terhadap perekonomian pariwisata suatu destinasi bisa sangat besar. Boikot dapat menurunkan jumlah pengunjung secara signifikan. Selain itu, boikot permusuhan non-politik dan politik memiliki intensitas dan dampak yang berbeda; dampak yang pertama dirasakan mempunyai dampak langsung dalam jangka pendek, sedangkan dampak yang kedua cenderung mempunyai dampak yang bertahan lama. Boikot pariwisata sebagai faktor risiko utama dalam pengelolaan destinasi (Yu dkk., 2020).

D. Isu Inflasi

Tingginya nilai tukar dan inflasi berdampak positif dan negatif terhadap kunjungan wisatawan internasional termasuk dampak risiko politik secara signifikan, dan mempunyai dampak positif dan negatif di destinasi berisiko rendah dan tinggi (Athari dkk., 2021). Menurut mereka, nilai tukar dan inflasi yang tinggi, memengaruhi kedatangan wisatawan internasional (International Tourism Arrivals) dalam pola positif dan negatif.

E. Isu Tata Kelola

Sebagaimana yang dapat dipahami, hubungan internasional dapat ditingkatkan dengan integrasi budaya dan pariwisata (Zhu dkk., 2022). Pengembangan pariwisata harus melampaui regenerasi ekonomi dan dengan mendorong proyek bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan komunitas, hal ini dapat membantu rekonsiliasi antar masyarakat (Causevic dan Lynch, 2013). Isu berkenaan tata kelola perusahaan dalam bidang pariwisata dan perhotelan sebagai temuan (Koh, 2024) termasuk Isu menyangkut pada kesetaraan gender dalam praktik pariwisata dan perhotelan (Je dkk., 2020).

Dampak kualitas tata kelola terhadap hubungan antara pariwisata dan pengentasan kemiskinan di 15 negara Amerika Latin dari tahun 2003-2015 menunjukkan bahwa kualitas tata kelola berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, sementara pembangunan pariwisata memperburuk kemiskinan. Pariwisata dan kualitas tata kelola memiliki dampak yang saling

melengkapi dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini menyoroti perlunya memberantas kemiskinan ekstrem dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) pada tahun 2030 (Dossou, 2021).

F. Isu Rasisme

Rasisme semakin diakui sebagai pendorong utama ketidaksetaraan yang tidak adil dalam hal kekuasaan, sumber daya, dan peluang di antara kelompok ras (Li dkk., 2020). Diskriminasi dan rasisme menciptakan pengalaman yang tidak ramah bagi para pemimpin perjalanan kulit hitam dalam industri pariwisata di Amerika Serikat (Benjamin dan Dillette, 2021).

Studi Shum dkk. (2020) menemukan bahwa dalam dunia industri perhotelan, diskriminasi dan rasisme terjadi dan memengaruhi kinerja para pekerja kulit berwarna di industri perhotelan. Orang kulit berwarna mengalami tingkat diskriminasi yang lebih tinggi daripada orang kulit putih sehingga terjadinya penurunan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang kulit berwarna memiliki tingkat kepuasan karier yang lebih rendah melalui peran mediasi diskriminasi rasial dan kepuasan kebutuhan dasar (Shum dkk., 2020).

G. Isu Politik di Pariwisata

Ketidakstabilan politik menyebabkan dampak negatif pada industri pariwisata suatu negara seperti terjadinya pendapatan menurun, jumlah wisatawan dan penginapan menurun, secara bersamaan biaya menjadi meningkat. Hal ini tidak hanya memengaruhi wilayah konflik, tetapi juga memengaruhi wilayah sekitar konflik (Ivanov dkk., 2017).

Risiko politik merupakan hambatan signifikan terhadap pertumbuhan total kedatangan wisatawan di suatu negara. ini menunjukkan bahwa dampak risiko politik terhadap kedatangan wisatawan internasional signifikan, dan memiliki efek positif dan negatif di destinasi masing- masing dapat berisiko rendah dan tinggi (Athari dkk., 2021).

H. Isu Kebijakan Pemerintah dalam Pariwisata

Agenda kebijakan secara signifikan memengaruhi kebijakan yang diberlakukan. Termasuk penetapan isu-isu kebijakan pariwisata yang masuk sebagai agenda publik. Studi di Iran, yang dilakukan oleh Motalegh dkk. (2021) menemukan hasil bahwa kebijakan berkenaan isu pariwisata relatif sedikit termasuk yang terkait dengan

manajemen pariwisata, mengembangkan produk pariwisata, dan memberlakukan aturan dan regulasi yang relevan. Isu kurangnya pariwisata yang masuk ke dalam agenda dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kebijakan pariwisata berikutnya, yang memengaruhi pengembangan pariwisata.

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada literasi berkenaan isu-isu dalam pariwisata di ASEAN. Keluasan informasi dan pembahasan bergantung pada literasi yang tersedia dalam basis data (data base) dan hasil analisis.

B. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan berdasar kata kunci (key words) "Tourism, Issues, dan ASEAN" dari judul penelitian atau artikel sebelumnya yang tersimpan dalam basis data di Scopus dalam rentang tahun 2022 - 2024. Rentang ini dipilih setelah COVID-19 usai dan masa pertumbuhan, sehingga akan lebih efektif dan relevan untuk diteliti.

C. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan deskriptif hasil pengumpulan artikel dan melakukan elaborasi dari setiap kesimpulan penelitian dan dikuatkan dengan hasil penelitian lain yang diambil dari basis data google scholar. Awalnya membagi menjadi tiga keyword dengan mengaji dan menganalisis masing-masing hasil temuan, kemudian dikategorikan berdasarkan tema utama untuk disimpulkan.

D. Kerangka Pemikiran

Adapun Kerangka pemikiran penelitian ini terdiri atas:

Tahap 1: Action, mengumpulkan data fenomena yang terjadi di lapangan sehingga mendapatkan sebuah kunci kata berupa "permasalahan" di bidang pariwisata yang menjadi tema penting dalam pengambilan keputusan penelitian menjadi sebuah isu.

Tahap 2: Revision, permasalahan yang diambil menjadi pendek karena menyangkut kegiatan pariwisata di area tertentu dalam rentang waktu tertentu dan penelitian difokuskan hanya pada kultur yang mirip yang dimungkinkan akan memiliki demografi yang hamper sama dan dalam rentang waktu pendek.

Tahap 3: Solution, fokus terikat dalam satu organisasi atau asosiasi negara-negara di Asia yang mengerucut menjadi ASEAN sebagai studi kasus dalam rentang waktu 2022-2024 setelah COVID-19 karena pariwisata mulai bertumbuh kembali di setiap negara.

Tahap 4: Strategy, metode kualitatif dengan studi literasi bersumber dari platform pencari data atau basis data Scopus.

Tahap 5: Objective, melihat isu yang terjadi, komitmen pemangku terhadap permasalahan isu, dan kontrol isu oleh pemangku kepentingan

Tahap 6: Analysis, menganalisis masing-masing isu yang terjadi di setiap anggota ASEAN; menganalisis komitmen pemangku kepentingan terhadap isu-isu yang terjadi di negara mereka; menganalisis kontrol terhadap isu; melakukan elaborasi dalam pembahasan dan diskusi, serta menarik kesimpulan.

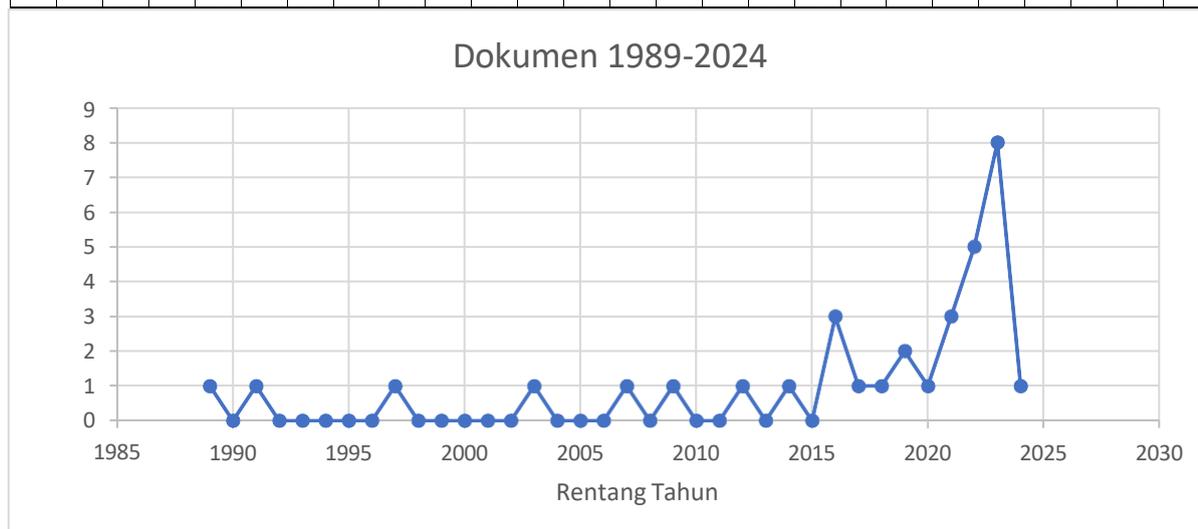
Tahap 7: Recommendation, memberikan pandangan berdasarkan hasil analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data literasi berasal dari basis data Scopus dengan data rentang tersedia sejak tahun 1989 – 2023. Jumlah data berupa dokumen tersedia sebanyak 32 berbahasa Inggris dan 1 tidak terdeteksi (unidentified). Pengambilan data dilakukan per tanggal 11 September 2024 dengan menggunakan keyword: Tourism, Issues, dan ASEAN. Dibawah ini ilustrasi data pada Tabel 1 dan Gambar 1 Jumlah Dokumen dalam rentang tahun 1989 - 2024.

Tahun	1989	1990	1991	1992-1996	1997	1998-2002	2003	2004-2008	2007	2008	2009	2010-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dokumen	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	3	1	1	2	1	3	5	8	1



Dokumen tersedia memiliki empat tipe atau kategori, yaitu artikel (16), artikel konfrensi (conference paper) (7), buku (2), dan buku yang terdiri dari beberapa bab kajian (book chapter) (8).

Penelitian ini dipersempit dengan data dokumen tahun 2022-2024 per 11 September 2024

dengan fokus pada dokumen berbahasa Inggris, empat subyek area (social science; business, management and accounting; environmental science, dan; economics, econometrics and finance). Dokumen yang tersedia sebanyak tujuh dokumen dengan tipe dokumen adalah artikel dan hasil konferensi. Di bawah ini adalah hasil pencarian dokumen dalam rentang 2022 -2024.

Tabel 2 Kajian Isu Pariwisata di ASEAN

No	Judul	Peneliti	Jurnal	Tahun	Tipe Dokumen	Tema
1	Solar Energy in Indonesia: The Implementation of Sustainable Development Goals for Net Zero Emissions	Kibtiah, T.M., Dewi, G.D.P., Bainus, A., Abdurrahman, M. F., RHasan, D., Suitela, K.M	IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1324(1), 012093	2024	Konferensi, <i>Open Acces</i>	Energi surya terbarukan
2	Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons: Challenges for Implementing ASEAN Convention on Trafficking in Persons in Vietnam	Huong, N.T.M., Vu, G.C.	Journal of Southeast Asian Human Rights , 7(1), pp. 78–92	2023	Artikel, <i>Open Acces</i>	Perdagangan Manusia
3	Promoting eco-tourism for the green economic recovery in ASEAN	Zhang, H., Liang, Q., Li, Y., Gao, P.	Economic Change and Restructuring , 56(3), pp. 2021–2036	2023	Artikel, <i>Open Acces</i>	Ekowisata
4	Effects of tourism and eco-innovation on environmental quality in	Wei, Z., Lihua, H.	Environmental Science and Pollution Research	2023	Artikel	Isu lingkungan

	selected ASEAN countries		, 30(15), pp. 42889–42903			
5	Understanding the difference of values-based motivation of managerial workers in spa businesses in Thailand	Suwanarat, Pomlapas.	International Journal of Emerging Markets ISSN: 1746-8809	2023/2021	Konferensi, <i>Open Acces</i>	Motivasi pekerja
6	Southeast Asian Regionalism: An Examination of the Progress and Priorities of ASEAN through its Joint Communiqués	Velasco, J.C.	Journal of ASEAN Studies , 11(2), pp. 245–265	2023	Artikel, <i>Open Acces</i>	Komunitas ASEAN
7	Overtaking Marine Pollution Issues for Sustainable Eco-Tourism in	Putri, A., Kamila, S.F.	IOP Conference Series: Earth and Environmental	2023	Konferensi, <i>Open Acces</i>	Program pariwisata berkelanjutan

	Mapur Island		Science , 1148(1), 012037			
--	--------------	--	------------------------------	--	--	--

Dari hasil pencarian literasi didapatkan enam literasi yang menurut peneliti lebih relevan (No. 1, 2, 3, 4, 6, dan 7), sedangkan satu artikel lain (Sumannarat) publikasi sudah dilakukan pada tahun 2021, sedangkan 2023 sebagai publikasi isu, sehingga tidak masuk pada rentang waktu yang dipilih. Tema inti dari literasi yang ada memiliki perbedaan pembahasan sehingga bisa dikatakan mewakili bidang kajian yang berbeda. Namun jika dilihat keterkaitan dengan wisata berdasarkan judul dan tema, hanya diwakili oleh artikel No. 2, 3, 4, dan 7. Untuk melihat objectivitas studi, maka perlu dibahas satu persatu agar tergambar isu yang menjadi studinya. Velasco (2023) membahas tentang analisis kemajuan dan prioritas utama Komunitas ASEAN, dengan fokus pada Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community-AEC) dan bidang politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Analisis tematik “joint communiqués” dari tahun 2004-2019 memberikan wawasan tentang lanskap kerja sama dan integrasi ASEAN yang terus berkembang. AEC memprioritaskan bidang-bidang pertumbuhan seperti pariwisata, usaha kecil menengah, dan energi, sementara politik-keamanan berfokus pada isu-isu perdamaian dan keamanan non-tradisional. Komunitas sosial-budaya berfokus pada isu-isu lingkungan, tanggap bencana, dan pemuda.

Wei dan Lihua (2023) studi, membahas topik yang berbeda di enam negara ASEAN dari tahun 1995 hingga 2018. Studi ini membahas tentang korelasi negatif signifikan antara eko-inovasi dan emisi CO₂ di negara-negara terpilih, dan pariwisata juga berdampak negatif pada emisi CO₂. Studi ini juga mendukung hipotesis di negara-negara ASEAN terpilih. Untuk mengurangi emisi karbon, pemerintah harus mendorong bisnis untuk mengejar inovasi dan meningkatkan inisiatif penelitian dan pengembangan (Research & Development) publik. Inisiatif Kebijakan Energi Hijau memiliki potensi keberlanjutan lingkungan yang signifikan, tetapi kebijakan lingkungan yang komprehensif diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang. Pembuat kebijakan harus mempromosikan representasi internasional melalui pameran atau media pariwisata.

Dalam sebuah penelitian dari hasil data literatur yang dilakukan oleh Sun dkk. (2022) ditemukan adanya konsensus yang rendah mengenai hubungan antara emisi dan pariwisata, dengan hasil yang saling bertentangan yang dilaporkan di berbagai wilayah, tingkat pendapatan, dan kepentingan ekonomi sektor tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh Wu dkk. (2023) dalam studinya dengan penggunaan data siklus hidup rentang waktu tahun 2014 hingga 2019 di Cina

yang menunjukkan hasil penggunaan energi dan emisi CO₂ di berbagai sektor pariwisata terus meningkat terutama dari adanya peningkatan aktivitas transportasi. Studi ini menggunakan data yang diperoleh dari perhitungan emisi CO₂ per wisatawan per perjalanan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap perilaku rendah karbon wisatawan. Transformasi rendah karbon dari fasilitas rekreasi di destinasi wisata, kebijakan penghargaan, dan pendidikan lingkungan dapat mengatur perilaku wisatawan, yang memegang kunci pembangunan pariwisata berkelanjutan termasuk di kawasan lindung.

Kibitiah dkk. (2024) membahas tentang energi terbarukan yang sedang digiatkan di Indonesia. Indonesia tengah beralih dari energi fosil ke energi terbarukan untuk mencapai Net Zero Emission (situasi di mana jumlah jejak karbon yang bersumber dari aktivitas manusia tidak melebihi jumlah emisi yang dapat diserap oleh bumi) pada tahun 2026. Energi surya merupakan komponen utama dari transisi ini. Namun, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan seperti mencari investor yang berkomitmen pada SDG poin-7 dan pertimbangan akuisisi lahan. Meskipun memiliki kendala dalam pengembangannya, pemerintah tetap memanfaatkan energi surya untuk mengatasi masalah korosi dan dampak lingkungan dalam tindakan preventif menyelamatkan.

Sustainable Development Goals (SDGs)-7 secara langsung tidak berhubungan dengan aktivitas wisata. Namun, implikasinya membawa wisata ke level yang lebih baik. Pariwisata membantu mengakses energi yang terjangkau dan bersih, karena menciptakan infrastruktur untuk semua pengguna. Kegiatan pariwisata berkontribusi terhadap sebagian besar konsumsi energi, terutama untuk destinasi dengan pariwisata sebagai industri pilar dalam perekonomian mereka. Pariwisata harus berupaya keras untuk mendukung konsumsi energi bersih (Buhalis, 2023).

Berdasarkan penelitian Prinsloo (2013), model wisata seperti ekowisata yang di bangun di daerah-daerah terpencil mengadopsi sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin memberikan keunikan dan daya tarik tersendiri sehingga menarik lebih banyak wisatawan daripada sebelumnya.

Zhang dkk. (2023) mengkaji dampak ekowisata terhadap pertumbuhan ekonomi hijau negara-negara ASEAN dari tahun 2000 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara indeks pembangunan berkelanjutan pariwisata dan indeks pertumbuhan ekonomi hijau. Peningkatan indeks pembangunan berkelanjutan pariwisata dan daya tarik wisatawan asing dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi hijau. Peningkatan indeks tata kelola pemerintahan yang baik, seperti berkurangnya birokrasi administratif dan kebebasan sipil yang lebih besar, juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi hijau. Koefisien nilai tukar

negara-negara ASEAN signifikan secara statistik, membuat proyek-proyek hijau lebih murah bagi investor asing. Namun, investasi asing langsung berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi hijau karena area-area yang tidak hijau. Ekonomi yang mengglobal tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi hijau ASEAN, yang menyoroti perlunya pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi global.

Artikel ini merekomendasikan beberapa kebijakan praktis untuk pariwisata berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah pengembangan rencana aksi bersama, yang akan mengatasi rencana jangka panjang yang tidak memadai di lapangan. Yang kedua adalah pengembangan pasar pembiayaan hijau untuk mempromosikan proyek ekowisata, yang menarik investor sektor swasta. Yang ketiga adalah peningkatan dukungan pemerintah untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dalam industri ekowisata. Yang keempat adalah penciptaan rantai nilai ekowisata regional, yang memungkinkan setiap negara anggota memiliki keunggulan relatif dalam ekowisata. Yang kelima adalah promosi infrastruktur digital untuk layanan ekowisata, dengan fokus pada model yang ramah lingkungan dan tanpa kertas.

Praktik ekowisata meyakini bahwa masyarakat lokal adalah kelompok yang paling penting dalam sistem ekowisata (Duong dan Pham, 2022). Namun pada praktiknya, persepsi masyarakat dalam praktiknya tidak selalu positif, termasuk seringkali adanya kurang dukungan dari organisasi pemerintah, kelemahan dalam undang-undang dan kebijakan pariwisata, serta masalah yang terkait dengan geografi dari sebuah destinasi (Irani dkk., 2022). Namun, secara umum, ekowisata berkelanjutan merupakan tren yang berkembang dalam industri pariwisata, yang berfokus pada pelestarian lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pengalaman pengunjung. Ekowisata berkelanjutan melibatkan pariwisata berbasis masyarakat, yang mempromosikan keterlibatan lokal, dan melestarikan warisan budaya. Proyek ekowisata juga berfokus pada konservasi satwa liar dan pemulihan habitat. Akomodasi berkelanjutan juga perlu untuk dikembangkan, termasuk penggunaan energi terbarukan, dan sistem pengelolaan limbah. Interpretasi dan edukasi juga penting, yang meningkatkan kesadaran tentang destinasi wisata dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Adapun pengalaman ekowisata, promosi pelestarian lingkungan, dan dukungan terhadap Masyarakat lokal perlu disampaikan dengan penggunaan teknologi dan inovasi digital (Badr, 2022).

Putri dan Kamila (2023) meneliti tentang *economy biru* (Blue Economy) di Kepulauan Riau dimana menyatakan bahwa Pemerintah daerah dan masyarakat sipil bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Riau, dengan tujuan menciptakan ekonomi biru. Kawasan Konservasi Perairan Bintan merupakan program yang bertujuan untuk

melindungi lingkungan laut dan pesisir, yang merupakan sumber utama pariwisata bahari. Namun, pariwisata juga dapat menimbulkan ancaman seperti lumpur minyak dan kerusakan fisik pada terumbu karang. Yayasan Ekologi juga terlibat aktif dalam upaya konservasi pesisir dan laut sejak 2017.

Pariwisata biru, yang erat kaitannya dengan ekonomi biru, bertujuan untuk menyeimbangkan keberlanjutan ekosistem dan pengembangan pariwisata yang sejalan dengan konvensi SDGs. Laut Indonesia sangat penting bagi pembangunannya, dan pariwisata biru berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus mempelajari potensi ini dan berkoordinasi dengan kementerian lain untuk menyiapkan infrastruktur bagi pariwisata biru. Setiap lokasi di Indonesia memiliki akses terhadap sumber daya laut, yang akan meningkatkan pariwisata dan pendapatan daerah (Supriyanto, 2022).

Aktivitas ekonomi biru juga dilakukan di tujuh negara Karibia, termasuk Bahama, Barbados, Belize, Guyana, Jamaika, Trinidad dan Tobago, dan Suriname yang di teliti sebelum dan setelah masa pandemik COVID-19. Studi ini menyoroti perbedaan dalam pengembangan sektor dan ketersediaan sumber daya, yang menunjukkan perlunya langkah-langkah khusus negara untuk menumbuhkan ekonomi. Untuk mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang, diperlukan agenda kebijakan ekonomi biru yang terkoordinasi, termasuk tata kelola yang baik, mekanisme pembiayaan berkelanjutan, peningkatan valuasi ekonomi ekosistem, dan koordinasi regional yang kuat (Phang dkk., 2023).

Huang dan Vu (2023) membahas kerangka hukum dan kebijakan di Vietnam dalam menanggapi perdagangan manusia. Artikel ini menyoroti berbagai tantangan seperti kurangnya penekanan untuk menjadikan perdagangan manusia sebagai kejahatan serius, definisi perdagangan manusia yang sempit, dan prosedur yang tidak efektif untuk identifikasi, investigasi, dan penuntutan. Artikel ini juga menyarankan agar undang-undang dan kebijakan dimodifikasi agar sesuai dengan instrumen internasional, meningkatkan kapasitas lembaga peradilan pidana, dan mendorong kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan investigasi dan meminta pertanggungjawaban para pelaku perdagangan manusia.

Permasalahan yang diangkat oleh Huang dan Vu merupakan permasalahan berkenaan kejahatan terhadap manusia. Hal tersebut akan memberikan dampak cukup besar karena terror yang bisa mencelakai siapapun termasuk pengunjung luar negara selain komunitas setempat. Perdagangan manusia diakui sebagai bentuk kejahatan terorganisasi internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dimana pariwisata, perjalanan, dan perhotelan melaporkan prevalensi perdagangan manusia yang tinggi, terutama untuk eksploitasi seksual (Kyriazi, 2022).

Perdagangan manusia sendiri terbagi atas komersialisasi seks, migrasi, dan perbudakan modern; eksploitasi anak, pelecehan seksual, dan kesehatan; dan perdagangan manusia dan lingkungan kelembagaan (Wen dkk., 2020). Industri pariwisata secara langsung dan tidak langsung terkait dengan perdagangan seks, misalnya akomodasi hotel dan konsumsi langsung layanan seksual, seperti melalui pariwisata seks. Meskipun ada upaya legislatif oleh badan-badan pemerintah internasional untuk memberantas perdagangan seks, masalah ini masih belum terselesaikan (Aston, 2022). Konsep teori pola kejahatan menjadi salah satu bentuk preventif yang dikumpulkan dari hasil investigasi kepada para korban Ketika bertemu dengan pelaku dimana hotel dikonfirmasi sebagai ruang aktivitas perdagangan manusia dan 'perjalanan kejahatan'. Kerangka kerja yang dihasilkan dari perjalanan korban perdagangan manusia dapat digunakan oleh setiap bisnis pariwisata yang ingin membantu mencegah kejahatan ini (Paraskevas dan Brookes, 2018).

Punam (2018) memberikan pernyataan yang sama bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan tersembunyi yang melibatkan eksploitasi, prostitusi, perbudakan, dan pornografi. Kejahatan ini merupakan kejahatan tersembunyi, yang sering kali terabaikan karena kendala bahasa, ketakutan terhadap pelaku perdagangan manusia, dan penegakan hukum. Keselamatan masyarakat dan korban adalah yang terpenting, dan penegak hukum harus menyelidiki kasus-kasus yang diduga. Punam menambahkan bahwa perlunya ada tindakan konkrit untuk menghilangkan pelecehan terhadap manusia yaitu dengan mempertimbangkan tujuan prioritas untuk membina stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta pengurangan migrasi yang disebabkan oleh kemiskinan yang parah dan faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan manusia. Kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan-tujuan ini juga harus mendorong pembangunan ekonomi dan inklusi sosial; meningkatkan akses anak-anak terhadap kesempatan pendidikan dan kejuruan serta meningkatkan tingkat kehadiran di sekolah, khususnya oleh anak perempuan dan kelompok minoritas; menangani kegiatan ekonomi ilegal yang merusak ekonomi dan meningkatkan perdagangan manusia; meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan dengan memfasilitasi peluang bisnis bagi usaha kecil dan menengah (UKM). mengorganisasikan kursus pelatihan UKM dan menargetkannya khususnya pada kelompok berisiko tinggi; mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat perlindungan sosial dan menciptakan kesempatan kerja bagi semua; Menangani segala bentuk diskriminasi terhadap kaum minoritas; mengembangkan program yang menawarkan pilihan mata pencaharian dan mencakup pendidikan dasar, literasi, komunikasi, dan keterampilan lainnya, serta mengurangi hambatan terhadap kewirausahaan; mendorong penyadaran dan pendidikan gender tentang

hubungan yang setara dan penuh rasa hormat antara kedua jenis kelamin, sehingga mencegah kekerasan terhadap Perempuan; memastikan adanya kebijakan yang memungkinkan perempuan memperoleh akses dan kendali yang sama atas sumber daya ekonomi dan keuangan; Mempromosikan pembiayaan yang fleksibel dan akses ke kredit, termasuk kredit mikro dengan bunga rendah; Mempromosikan tata kelola yang baik dan transparansi dalam transaksi ekonomi.

Kesimpulan

Dilatarbelakangi oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) sebagai sebuah cita-cita Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterjemahkan dalam sebuah pedoman dengan tujuan mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi kesenjangan, dan mengatasi perubahan iklim sambil memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang terabaikan. Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi SDG melalui resolusi Majelis Umum A/RES/70/1 pada tanggal 25 September 2015. Program SDG ini memiliki 17 tujuan (goals), yaitu (1) Tanpa kemiskinan (No Poverty), (2) Tanpa kelaparan (Zero Hunger), (3) Kehidupan sehat dan sejahtera (Good Health and Well-Being), (4) Pendidikan yang berkualitas (Quality Education), (5) Kesetaraan gender (Gender Equality), (6) Air bersih dan sanitasi layak (Clean Water and Sanitation), (7) Energy bersih dan terjangkau (Affordable and Clean Energy), (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Decent Work and Economic Growth), (9) Industri, inovasi dan infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure), (10) Berkurangnya kesenjangan (Reduced Inequalities), (11) Kota dan komunitas yang berkelanjutan (Sustainable Sites and Communities), (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Responsible Consumption and Production), (13) Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action), (14) Ekosistem laut (Life Below Water), (15) Ekosistem darat (Life on Land), (16) Kedamaian, keadilan, dan ketahanan kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice and Strong Institution), (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan (Partnership for the Goals) (un.org). Tujuan ini menjadi kunci pengelolaan di seluruh dunia terutama ASEAN.

Negara-negara di ASEAN tergabung dalam anggota PBB yang memiliki komitmen yang sama dalam peningkatan kesejahteraan negara yang datang dari kesejahteraan masyarakatnya. Kendala-kendala yang terjadi persis dengan yang terjadi di dunia dan menjadi perhatian bersama. Isu Emisi, Hijau, Ekonomi Biru, Inovasi, kriminal seperti perdagangan manusia (bisnis ilegal), dan isu kebijakan, mengerucut pada isu global yang harus ditangani. Walaupun hasil rentang data tidak bisa menyimpulkan kondisi keseluruhan. Namun, sebab akibat dari isu

ini memberikan efek domino.

Seperti berbicara tentang perbudakan, hal ini bisa diakibatkan oleh kemiskinan atau masalah ekonomi, diskriminasi, kurang pengalaman akibat edukasi yang rendah sehingga menimbulkan keputusan yang salah dari rasa takut, hukum dan kebijakan yang tidak ideal yang bisa diakibatkan oleh iklim politik yang fluktuatif, menjadi sebuah lingkaran yang buruk bagi keamanan aktivitas kunjungan ke suatu negara. Inovasi aktivitas menjadi sebuah peluang untuk mengembalikan kepercayaan dengan dibarengi rasa aman untuk kunjungan.

Materi yang ditelaah menggarisbawahi berbagai aspek terkait kemajuan, tantangan, dan prioritas dalam konteks ASEAN serta isu-isu terkait pariwisata, ekonomi hijau, dan kejahatan manusia dimana membahas tentang Kemajuan dan Prioritas ASEAN yang berfokus pada sektor-sektor seperti pariwisata, usaha kecil menengah, dan energi, sementara bidang politik-keamanan dan sosial-budaya mengutamakan isu-isu perdamaian, keamanan non-tradisional, lingkungan, dan pemuda. Analisis dari "joint communiqués" menunjukkan perkembangan berkelanjutan dalam integrasi ASEAN.

Temuan yang membahas tentang Ekonomi Hijau dan Pariwisata menyatakan bahwa ekoinovasi memiliki hubungan negatif dengan emisi CO₂ di ASEAN, sementara pariwisata juga berkontribusi pada emisi CO₂. Penelitian menekankan perlunya kebijakan energi hijau dan peningkatan R & D untuk mendukung keberlanjutan. Ekowisata dapat mendukung pertumbuhan ekonomi hijau melalui peningkatan tata kelola dan investasi yang lebih baik. Membahas transisi Indonesia dari energi fosil ke energi terbarukan, dengan fokus pada energi surya sebagai komponen utama. Meski ada tantangan dalam pengembangan, energi terbarukan diharapkan dapat mendukung tujuan Net Zero Emission 2026. Perlunya menyoroti Pariwisata dan Ekonomi Biru dimana bertujuan untuk menyeimbangkan keberlanjutan ekosistem dengan pengembangan ekonomi, sementara perlu menekankan pentingnya kebijakan ekonomi biru untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang.

Selain fokus pada dampak alam yang ditimbulkan dari aktivitas manusia yang seringkali merusak ekosistem alam, sehingga perlu kesadaran seperti hal yang telah disebutkan diatas, perlu juga memperhatikan permasalahan yang timbul dari superior manusia terhadap manusia lainnya yang seringkali tidak tertangkap oleh hukum karena lemahnya kebijakan dalam pengawasan bagi keselamatan orang lain sehingga menimbulkan tindakan ilegal dan kriminal. Terjadinya tindakan kriminal seperti perdagangan manusia seringkali berkaitan dengan aktivitas wisata. Maka, perlunya reformasi hukum, peningkatan kapasitas lembaga, dan kebijakan preventif untuk memerangi perdagangan manusia yang sering kali terkait dengan pariwisata.

Limitasi Penelitian

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa hasil pencarian mewakili isu-isu dilapangan namun dengan sedikitnya data yang ada, penelitian ini pun memiliki limitasi dari keseluruhan isu yang terjadi di dunia. Perlu memperluas literasi untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh dari berbagai sumber basis data sehingga permasalahan yang terjadi di ASEAN lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agyeiwaah, Elizabeth (2020). Over-tourism and sustainable consumption of resources through sharing: the role of government. *International Journal of Tourism Cities*, 6(1), 99-116. <http://doi.org/10.1108/IJTC-06-2019-0078>
- Aston, J., Wen, J., Goh, E. dan Maurer, O. (2022), "Promoting awareness of sex trafficking in tourism and hospitality", *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, Vol. 16 No. 1, pp. 1-6. <https://doi.org/10.1108/IJCTHR-01-2020-0032>
- Athari, S. A., Alola, U. V., Ghasemi, M., dan Alola, A. A. (2021). The (Un)sticky role of exchange and inflation rate in tourism development: insight from the low and high political risk destinations. *Current Issues in Tourism*, 24(12),1670-1685. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1798893>
- Badr, Mohamed El Moslem (2022). Challenges and Future of the development of sustainable ecotourism. *International Journal of Modern Agriculture and Environment*, 2(2), 54-72. <http://doi.org/10.21608/ijmae.2023.214937.1006>
- Beh, Loo-See dan Lin, Woon Leong (2022). Impact of COVID-19 on ASEAN Tourism Industry. *Journal of Asian Public Policy*, 15(2), 300-320. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1871180>
- Benjamin, Stefanie and Dillette, A. K. (2021). Black Travel Movement: Systemic racism informing tourism. *Annals of Tourism Research*, 88(2021), 103169. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103169>
- Buhalis, D., Leung, X.Y., Fan, D., Darcy, S., Chen, G., Xu, F., Wei-Han Tan, G., Nunkoo, R. and Farmaki, A. (2023). "Editorial: Tourism 2030 and the contribution to the sustainable development goals: the tourism review viewpoint", *Tourism Review*, 78(2), 293-313. <https://doi.org/10.1108/TR-04-2023-620>
- Causevic, Senija dan Lynch, Paul (2013). Political (in)stability and its influence on tourism

- development. *Tourism Management*, 34(2013), 145-157.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.04.006>
- Dossou, T. A. M., Kambaye, E. N., dan Eoulam, A. O. (2021) Exploring the Linkage Between Tourism, Governance Quality and Poverty reduction in Latin America. *Tourism Economics*, 29(1). <https://doi.org/10.1177/13548166211043974>
- Dossou, Toyo Amègnonna Marcel dan Berhe, Mesfin Welderufael (2024). Towards Efforts to Equalize Income in Africa: The Role of Tourism Development. *Tourism Planning and Development*. <https://doi.org/10.1080/21568316.2024.2347211>
- Duong, T. H. dan Pham, H. T. (2022). Analysis on the Stakeholders of Ecotourism in Viet Nam. *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 4(2), 329-333. <http://doi.org/10.35629/5252-0402329333>
- Faraj, Rasha dan Chible, Hussein (2020). Effect of Social Media on Tourism during Lebanese Political Crisis. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 8(1), 82-92. <https://doi.org/10.15640/jthm.v8n1a9>
- Hastangka dan Farid, Muhammad (2020). Kebijakan Politik Presiden Jokowi Terhadap Masalah Kewarganegaraan Dalam Merespons Isu Global: Studi Kasus Covid-19. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-12.
- Huong, N. T. M. dan Vu, G. C. (2023). Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons: Challenges for Implementing ASEAN Convention on Trafficking in Persons in Vietnam. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7(1), 73 -92. <http://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.3863>
- Irani, H. R., Golverdi, M., Rastegar, R. dan Rezaei, S. (2022). Rapid ecotourism development and challenges: the case of ecolodge in Iran, *Tourism Recreation Research*, 49(4), 905-910. <https://doi.org/10.1080/02508281.2022.2086417>
- Ivanov, S., Gavrilina, M., Webster, C., dan Ralko, V. (2017). Impacts of political instability on the tourism industry in Ukraine. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 9(1), 100-127.
- Je, J. S., Khoo, C., dan Yang, E. C. L. (2020). Gender issues in tourism organisations: insights from a twophased pragmatic systematic literature review. *Journal Of Sustainable Tourism*. 1-24. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1831000>
- Karali, A., Das, S., dan Roy, H. (2021). Forty Years of The Rural Tourism Research: Reviewing the Trend, Pattern and Future Agenda. *Tourism Recreation Research*. <https://doi.org/10.1080/02508281.2021.1961065>

- Kibtiah, T.M., Dewi, G.D.P., Bainus, A., Abdurrahman, M. F., RHasan, D., dan Suitela, K.M. (2024). Solar Energy in Indonesia: The Implementation of Sustainable Development Goals for Net Zero Emissions. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1324 (2024) 012093. <http://doi.org/10.1088/1755-1315/1324/1/012093>
- Khan, A., Bibi, S., Lorenzo, A., Lyu, J., and Babar, Z. U. (2020). Tourism and Development in Developing Economies: A Policy Implication Perspective. *Sustainability*, 12 (2020), 1618. <http://doi.org/10.3390/su12041618>
- Koh, Yoon (2024). The industry-academia gap on the corporate governance issues in tourism and hospitality: A critical review and future research suggestions. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 41(1), 3-19. <https://doi.org/10.1080/10548408.2023.2229364>
- Kwabi, F., Ezeani, E., Owusu, A., Wonu, C. dan Hu, W. (2023). The impact of the media on tourism development and income inequality. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(9) 2062–2079. <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2166516>
- Kyriazi, Tenia (2022). The private sector against human trafficking in tourism. *An International Journal of Tourism and Hospitality Research*, 34(1) 30-44. <https://doi.org/10.1080/13032917.2023.2129675>
- Li, S., Li, G., Law, R., dan Paradie, Y. (2020). Racism in tourism reviews. *Tourism Management*, 8(20). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104100>
- Mahmudah, Rif'atul dan Imelda, Johanna Debora (2021). Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Kepemimpinan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, (6)2, 1-14. <http://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11179>
- Martial, A. A. A., Dechun, H., Voumik, L. C., Islam, Md. J., dan Majumder, S. C. (2023). Investigating the Influence of Tourism, GDP, Renewable Energy, and Electricity Consumption on Carbon Emissions in Low-Income Countries. *Energies*, 16, 4608. <https://doi.org/10.3390/en16124608>
- Motalegh, F. R., Vaezi, R., Ziaee, M. dan Hoseinpour, D. (2021). Tourism Issues on Iran's Public Policy Agenda. *Tourism Management Studies*, 16(55), 11-40. <https://doi.org/10.22054/tms.2021.59392.2513>
- Nurjaya, I Nyoman (2018). Sustainable Tourism Development of Indonesia: Policy and Legal Politic Point of View. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 282, 199-203.
- Ntounis, N., Parker, C., Skinner, H., Steadman, C. and Warnaby, G. (2022). Tourism and Hospitality industry resilience during the Covid-19 pandemic: Evidence from England.

Current Issues in Tourism, 25(1), 46-59.

<https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1883556>

Phang, S., March, A., Touron-Gardic, G., Deane, K., and Failler, P. (2023). A review of the blue economy, potential, and opportunities in seven Caribbean nations pre-COVID-

19. *ICES Journal of Marine Science*, 80, 2233–2243. <http://doi.org/10.1093/icesjms/fsac230>

Paraskevas, A. dan Brookes, M. (2018). Nodes, guardians and signs: Raising barriers to human trafficking in the tourism industry. *Tourism Management*, 67(2018), 147-156.

<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.01.017>

Prinsloo, F.C. (2013), “Impact of renewable energy structures on tourism”, Research Report, Stellenbosch University.

Punam, Shashi (2018). Human Trafficking: Causes and Implication.

<https://www.researchgate.net/publication/338457522>

Putri, A. dan Kamila, S. F. (2023). Overtaking Marine Pollution Issues for Sustainable EcoTourism in Mapur Island. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 1148

(2023) 012037. <http://doi-org/10.1088/1755-1315/1148/1/012037>

Rosalina, P. D., Dupre, K., dan Wang, Y. (2021). Rural tourism: A systematic literature review on definitions and challenges. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 47

(2021), 134-149. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.03.001>

Seyfi, Siamak and Hall, C. Michael (2020). Sanctions and tourism: effects, complexities and research. *An International Journal of Tourism Space, Place and*

Environment, 22(4-5), 749-767.

<https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1663911>

Shang, Y., Yang, Qin, and Pu, Y. (2024). Role of foreign direct Investment and political openness in boosting the eco-tourism sector for achieving sustainability. *Humanities and*

Social Sciences Communication. | <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02592>

Shao, Y., Hu, Z., Luo, M., Huo, T., and Zhao, Q. (2021). What is the policy focus for tourism recovery after the outbreak of COVID-19? A co-word analysis. *Current Issues In*

Tourism, 24(7), 899–904. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1806798>

Shum, C., Gatling, A., and Garling, J. (2020). All people are created equal? Racial discrimination and its impact on hospitality career satisfaction. *International Journal of*

Hospitality Management, *International Journal of Hospitality Management*, 89(2020), 102407. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102407>

Streimikiene, D., Svagzadiene, B., Jasinskas, E., dan Simanavicius, A. (2021). Sustainable

- Tourism development and Competitiveness: The Systematic literature Review. *Sustainable Development*, 29(1), 259-271. <https://doi.org/10.1002/sd.2133>
- Sun, Y-Y., Gossling, S., dan Zhou, W. (2022). Does tourism increase or decrease carbon emissions? A systematic review. *Annals of Tourism Research*, 97(2022), 103502. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103502>
- Supriyanto, Eko Eddy (2022). Blue Tourism: Treating Marine Ecosystems And Increasing the Potential Of Maritime Tourism In Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 16(2), 138-148. <https://doi.org/10.47608/jki.v16i22022.138-148>
- Sustainable Development Goals. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>
- The ASEAN (2024). Economic Community Digest: Developing Sustainable Tourism in a Post COVID-19 ASEAN. [https://theaseanmagazine.asean.org/article/the-asean-economic-community-digest-developing-sustainable-tourism-in-a-post-covid-19-asean/#:~:text=The%20tourism%20sector%20is%20a,people%20\(ADB%2C%202022\)](https://theaseanmagazine.asean.org/article/the-asean-economic-community-digest-developing-sustainable-tourism-in-a-post-covid-19-asean/#:~:text=The%20tourism%20sector%20is%20a,people%20(ADB%2C%202022))
- UN Tourism Barometer. Latest Tourism Data. What are the main factors weighing on the recovery of international tourism?. <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>
- Velasco, Joseph Ching (2023). Southeast Asian Regionalism: An Examination of the Progress and Priorities of ASEAN through its Joint Communiqués. *Journal of ASEAN Studies*, 11(2), 245–265. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i2.9402>
- Wei, Zhao dan Lihua, Huang (2023). Effects of tourism and eco-innovation on environmental quality in selected ASEAN countries. *Environ Sci Pollut Res* 30, 42889–42903. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-17541-z>
- Wen, J., Klarin. A., Goh, E., Aston, J. (2020). A systematic review of the sex trafficking-related literature: Lessons for tourism and hospitality research. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 45(2020), 370-376. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.06.001>
- Wu, J., Wang, S., Liu, Y., Xie, X., Wang, S., Lv, L., dan Luo, H. (2023). Measurement of Tourism-Related CO2 Emission and the Factors Influencing Low-Carbon Behavior of Tourists: Evidence from Protected Areas in China. *International Journal Environmental Research Public Health*, 20(2), 1277. <https://doi.org/10.3390/ijerph20021277>
- Yu, Q., McManus, R., Yen, D. A., dan Li, X. (Robert) (2020). Tourism boycotts and animosity: A study of seven events. *Annals of Tourism Research*, 80(2020), 102792. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102792>

Zhang, H., Liang, Q., Li, Yu, dan Gao, P. (2023). Promoting eco-tourism for the green economic recovery

in ASEAN. *Economic Change and Restructuring*, 56, 2021–2036.

<https://doi.org/10.1007/s10644-023-09492-x>

Zhang, Jiekuan (2023). The nonlinear effects of tourism on rural income inequality and urban–rural income inequality: Evidence from China. *Tourism Economics*, 29(1) 172–193.

<https://doi.org/10.1177/13548166211041>

Zhu, J. (Jason), Siriphon, A., Airey, D., and Mei-lan, J. (2022). Chinese tourism diplomacy: a chinese–style modernity review. *An International Journal of Tourism and Hospitality Research*, 33(4), 550-563.

<https://doi.org/10.1080/13032917.2021.1978515>